

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAN EFESIENSI BELANJA DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Anggi Pratama Nasution, S.E, M.Si

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Bagus Handoko, S.E, M.Si

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Ilham Rizki Adi Pohan, SE

Alumni Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

This study aims to analyze the influence of local revenue variables, central government transfers, and efficiency of local expenditure, to the regional financial independence. This study collects empirical evidence. The population in this study were all districts / cities in North Sumatra Province period 2011-2013, and the sample in this study amounted to 28 districts / cities in the Province of North Sumatra. In this thesis research writer use causal associative research design. Sampling method in this research is by purposive sampling method. The type of data used by the author is secondary data and data processing is done by using statistical program tool. Classical assumption test used by writer include normality test, multicollinearity test, and heterokedastisitas test. While the research model used by the authors is to use statistical analysis of multiple linear regression equation, as for hypothesis testing is done by simultaneous significance test, partial significance test, and coefficient determinant. Based on the result of research, it is known that the variable of original revenues, central government transfers, and efficiency of regional expenditure, simultaneously significant influence to the regional financial independence. Partially, local revenue variable, central government transfers have a significant effect on local financial independence. However, the efficiency of local expenditure has no positive effect on local financial independence.

Keywords: *Analysis of the Effect of Original Income, Central Government Transfer and Efficiency of Regional Expenditure on Regional Financial Independence in North Sumatra Province*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi yang terjadi di negara kita saat ini memberikan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan. Salah satu dari perubahan tersebut adalah timbulnya otonomi daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan pemerintah daerah mengalami perubahan. Perubahan peraturan ini memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. Undang-undang tersebut juga memberikan landasan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya dengan menganut asas kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berusaha mencapai efisien, efektif dan lebih bertanggung jawab. Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau desentralisasi yaitu agar pemerintah daerah lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunannya, karena dengan desentralisasi pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga makin banyak keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang. Otonomi bagi pemerintah daerah merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan. Masalah

yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman, selain PAD kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat, pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemandirian keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Provinsi Sumatera sebagai daerah otonom yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 kota. Berdasarkan Gambar 1.1, tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 sebesar 5,37% dan tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 5,83% dan hal ini terus terjadi sampai tahun 2013 menjadi 6,27%. Pola hubungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat pada tahun 2011, 2012 dan 2013 yaitu bersifat Pola hubungan Instruktif (0 - 25%) , merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial). Melihat tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami trend peningkatan setiap tahunnya hal ini menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Namun, secara umum rata-rata kabupaten/kota kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat masih tinggi. Artinya kemandirian keuangan daerah masih rendah.

Dengan realisasi anggaran belanja daerah yang tidak sesuai harapan, salah satu tantangan terberat yang dihadapi pemerintahan adalah pembangunan infrastruktur. Dalam pembangunan infrastruktur, kebutuhan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia sangat tinggi. Sementara itu, pemerintah memiliki anggaran relatif terbatas dalam APBN. Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja daerah dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat dan efisiensi belanja daerah, dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah baik secara parsial dan simultan pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengukur pengaruh pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat dan efisiensi belanja daerah terhadap kemandirian keuangan daerah secara simultan maupun parsial terhadap kemandirian keuangan daerah di kab/kota Provinsi Sumatera Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat dimaksud sebagai hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Halim (2007:25), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal-hal yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-

barang inventaris milik daerah. Lalu ada kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan menteri meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penata usaha keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2. Kemandirian Keuangan Mandiri

Menurut Halim (2008:232), kemandirian keuangan daerah ialah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota ditekankan pada kemampuannya dalam membiayai sendiri segala bentuk kegiatan daerahnya masing-masing di mana pembiayaan itu diperoleh dari pendapatan asli daerah. Maka, menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk menggali sumber keuangan daerahnya agar dapat menghasilkan pendapatan asli daerah dalam jumlah yang maksimum guna menanggulangi semua aktivitas ataupun kegiatan pada setiap daerahnya, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungannya tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Berdasarkan Rasio kemandirian dijabarkan dalam rumus sebagai berikut :

Rasio Kemandirian :

$$[\text{Realisasi PAD/bantuan pemerintah pusat (pinjaman)}] \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern.

3. Pendapatan Asli Daerah

PAD menurut (Halim 2009: 64), “ Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah ”. Upaya peningkatan PAD secara positif dalam pengertian daerah harus dapat dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan PAD untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru tanpa membebani masyarakat dan tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Upaya peningkatan PAD tersebut harus dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik. Menurut (Harianto dan Adi, 2007), Apabila suatu daerah PAD-nya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan dapat digunakan pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Berikut ialah rumus Rumus pengukuran untuk mencari Pendapatan Asli Daerah :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Transfer Pemerintah Pusat

Menurut (Halim 2009:65), “Transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah”.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut (Saragih 2011:85), ialah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam keuangan Negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

“Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang disebut dengan Bagian Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)”. (Kadjatmiko, 2008:79).

5. Efisiensi

Efisiensi adalah merupakan suatu kemampuan perusahaan/pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input) yang serendah-rendahnya untuk menghasilkan suatu keluaran (output), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sebenar-benarnya.

Sedangkan menurut Supriyono dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Manajemen II” yang mendefinisikan, “Efisiensi adalah jika suatu unit dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan”.(Supriyono, 2007:35)

6. Belanja Daerah

Menurut Kepmendagri nomor 29 tahun 2002, Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Halim (2007:322) menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut Yuwono dkk, (2005:108) menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

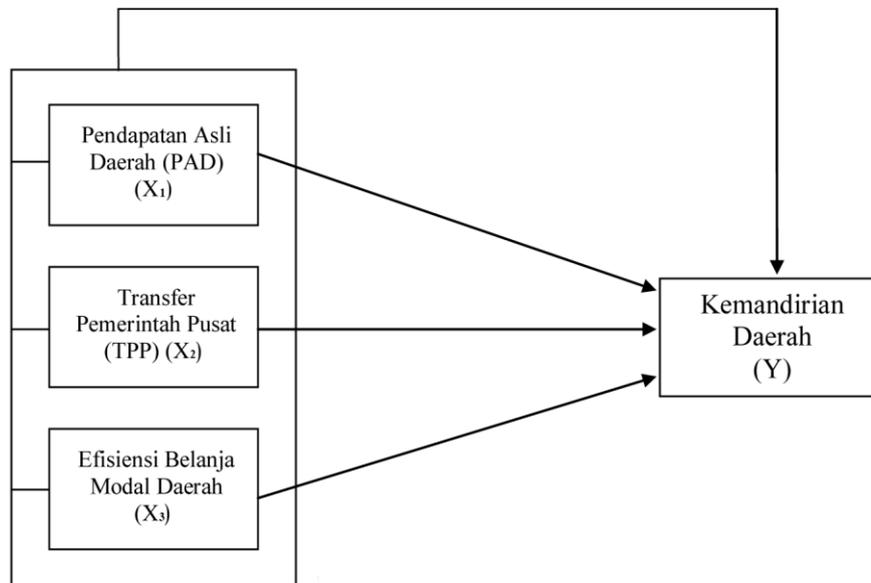
Didalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 16 disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan

keajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Rumus pengukuran untuk mencari Belanja Daerah :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah asosiatif kausal. Menurut (Sujarweni 2015), penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan dalam (Sedarmayanti dan Syafrudin, 2011), penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bersifat menghubungkan dua variabel atau lebih dapat berupa hubungan sebab akibat, hubungan saling mempengaruhi, dan hubungan sejajar.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari data sekunder yakni dokumen dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>) dan Situs Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (<https://sumut.bps.go.id>) sesuai dengan data yang dibutuhkan. Waktu Penelitian dilakukan mulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan Agustus 2017.

C. Sumber Data

Sumber Data dari dokumen dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>) dan Situs Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (<https://sumut.bps.go.id>)

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti (Hadi, 2006:45). Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Ikhsan, 2008:117). Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada pemerintah kota di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2011-2013, di mana terdapat 33 kab/kota. Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh

populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut (Ikhsan, 2008:118). Jumlah Sampel yang di pakai oleh peneliti sebanyak 28 pemerintah daerah kab/kota di Provinsi Sumatera Utara. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan cara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel melalui atau dengan pertimbangan/kriteria tertentu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan teknik dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data sekunder, mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan cara mendownload (unduh) Laporan Realisasi APBD Tahun 2011-2013 yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>)

F. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linear berganda, dan uji hipotesis dengan uji simultan (uji-F), uji parsial (uji-T) serta uji residual untuk variabel moderating dengan menggunakan software SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi, dari variabel pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, efisiensi belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sampel pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif dari Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (X1)	.0635	13.8425	.954198	2.3273853
Transfer Pemerintah Pusat (X2)	.2330	1.3935	.537599	.2649891
Efisiensi Belanja Daerah (X3)	.0938	1.9591	.375481	.3745990
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	.0703	.7839	.199770	.1162377
Valid N (listwise)				

Sumber: data olahan SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui pendapatan asli daerah minimum adalah 0,0635 dan maksimum 13,8425. Sementara rata-rata dan standar deviasi dari pendapatan asli daerah adalah 0,954 dan 2,327. Diketahui transfer pemerintah pusat minimum adalah 0,2330, dan maksimum 1,3935. Sementara rata-rata dan standar deviasi dari transfer pemerintah pusat adalah 0,537 dan 0,264. Diketahui efisiensi belanja daerah minimum adalah 0,0938, dan maksimum 1,9591. Sementara rata-rata dan standar deviasi dari efisiensi belanja daerah adalah 0,375 dan 0,374. Diketahui nilai kemandirian keuangan daerah minimum adalah 0,0703, dan maksimum 0,7839. Sementara rata-rata dan standar deviasi dari kemandirian keuangan daerah adalah 0,199770 dan 0,1162377.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0,05$. Dasar

pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas p , dengan ketentuan sebagai berikut.

Jika nilai probabilitas 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi.

Jika probabilitas $< 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi

Tabel 4.2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

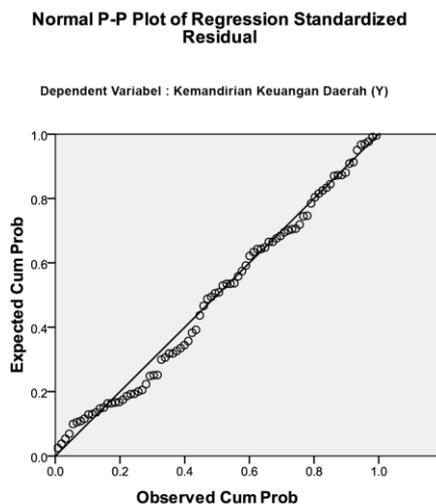
		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04700586
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		.677
Asymp. Sig. (2-tailed)		.750

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel 4.2, diketahui nilai probabilitas p atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,750. Karena nilai probabilitas p , yakni 0,750, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.

Gambar 4.2 merupakan *output* dari SPSS untuk uji normalitas dengan pendekatan *normal probability plot*. Pada *normal probability plot* (Gambar 4.1), titik-titik menyebar cukup dekat pada garis diagonal, maka disimpulkan bahwa asumsi normalitas dipenuhi.



Gambar 4.1
Uji Normalitas dengan Pendekatan Normal Probability Plot

b. Uji Multikolinearitas

Untuk memeriksa apakah terjadi multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai VIF yang lebih dari 10 diindikasikan suatu variabel bebas terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2013).

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan Asli Daerah (X1)	.411	2.431
Transfer Pemerintah Pusat (X2)	.366	2.729
Efisiensi Belanja Daerah (X3)	.340	2.937

Sumber: data olahan SPSS, 2016

Perhatikan bahwa berdasarkan Tabel 4.3, nilai VIF dari pendapatan asli daerah adalah 2,431, nilai VIF dari transfer pemerintah pusat adalah 2,729, dan nilai VIF dari efisiensi belanja daerah adalah 2,937. Karena *masing-masing* nilai VIF tidak lebih besar dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas yang berat.

c. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2011) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Asumsi mengenai *independensi* terhadap residual (non-autokorelasi) dapat diuji dengan menggunakan uji Durbin-Watson (Gio, 2015:61-62, Field, 2009:220). Nilai statistik dari uji Durbin-Watson berkisar di antara 0 dan 4. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasikan terjadi autokorelasi.

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin Watson
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.915 ^a	.836	.830	.0478791	1.655

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Belanja Daerah (X3), Transfer Pemerintah Pusat (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Sumber: data olahan SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 4.4, nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 1,655. Perhatikan bahwa karena nilai statistik Durbin-Watson terletak di antara 1 dan 3, maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi autokorelasi. Pengambilan keputusan apakah terjadi autokorelasi atau tidak, juga dapat diuji dengan uji Run (Ghozali, 2013).

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi dengan Uji Run

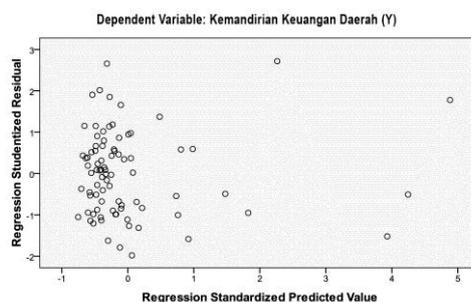
Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00085
Cases < Test Value	42
Cases >= Test Value	42
Total Cases	84
Number of Runs	35
Z	-1.756
Asymp. Sig. (2-tailed)	.079

a. Median

Berdasarkan hasil uji Run di atas (Tabel 4.6), diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah $0,079 > 0,05$. Hal ini berarti, tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual.

d. Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X. (Ghozali, 2013:139). Ghozali (2013:139) menyatakan dasar analisis adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas

Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 4.2, tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebar di atas *dan* di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji statistik Glejser dipilih karena lebih dapat menjamin keakuratan hasil dibandingkan dengan uji grafik plot yang dapat menimbulkan bias (Ghozali, 2013, Gujarati, 2004, Gio dan Elly, 2015). Kriteria yang *digunakan* untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak di antara data pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien signifikansi. Koefisien signifikansi harus dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya (5%). Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Jika koefisien signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.074	.014		5.227	.000
Pendapatan Asli Daerah (X1)	.028	.004	.551	7.820	.000
Transfer Pemerintah Pusat (X2)	.176	.033	.402	5.377	.000
Efisiensi Belanja Daerah (X3)	.012	.024	.039	.509	.612

a. Dependent Variable: abs_residual_Glejser

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui nilai probabilitas atau Sig. dari pendapatan asli daerah adalah 0,000, nilai probabilitas atau Sig. dari transfer pemerintah pusat adalah 0,000, dan *nilai* probabilitas atau Sig. dari efisiensi belanja daerah adalah 0,000. Karena masing-masing nilai probabilitas (Sig.) $> 0,05$, maka disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, dan efisiensi belanja daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Pendapatan Asli Daerah (X1), Transfer Pemerintah Pusat (X2), Efisiensi Belanja Daerah (X3), dan Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.074	.014		5.227	.000
Pendapatan Asli Daerah (X1)	.028	.004	.551	7.820	.000
Transfer Pemerintah Pusat (X2)	.176	.033	.402	5.377	.000
Efisiensi Belanja Daerah (X3)	.012	.024	.039	.509	.612

Sumber: data olahan SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 0,074 + 0,028X_1 + 0,176X_2 + 0,012X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta (a) = 0.074 menunjukkan konstanta, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel penyusunan kemandirian keuangan daerah (Y) sama dengan 0.074.
- Koefisien X1 (b1) = 0.028, menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya, jika variabel pendapatan asli daerah ditingkatkan maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 0.028.
- Koefisien X2 (b2) = 0,176, menunjukkan bahwa variabel transfer pemerintah pusat (X2) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya, jika variabel transfer pemerintah pusat ditingkatkan maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,176.
- Koefisien X3 (b3) = 0,012 menunjukkan bahwa variabel efisiensi belanja daerah (X3) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). Artinya, jika variabel efisiensi belanja daerah ditingkatkan maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,012.
- Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

4. Pengujian Hipotesis

Pada pengujian hipotesis, akan dilakukan analisis koefisien determinasi, uji signifikansi pengaruh simultan (uji F), dan uji pengaruh parsial (uji t).

1. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas (Supranto, 2005:158, Gujarati, 2003:212).

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.915 ^a	.836	.830	.0478791

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Belanja Daerah (X3), Transfer Pemerintah Pusat (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: data olahan SPSS, 2016

Berdasarkan Tabel 4.8, nilai koefisien determinasi R^2 terletak pada kolom *R-Square*. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar $R^2 = 0,830$, hal ini berarti 83% variabel kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen (PAD, TPP, dan Efisiensi Belanja Daerah). Sedangkan sisanya ($100\% - 83\% = 17\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak termasuk kedalam model penelitian ini.

2. Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji *F*)

Uji signifikansi koefisien regresi parsial secara menyeluruh merupakan suatu uji untuk menguji apakah seluruh koefisien regresi parsial secara menyeluruh atau simultan sam dengan nol atau tidak (Gujarati, 2003). Dengan kata lain, menguji apakah variabel pendapatan asli daerah, dana transfer pemerintah pusat, dan efeseinsi belanja daerah secara bersamaan atau simultan mempengaruhi variabel kemandirian keuangan daerah kab/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.9
Uji Pengaruh Simultan dengan Uji *F*

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.938	3	.313	136.398	.000 ^a
	Residual	.183	80	.002		
	Total	1.121	83			

a. Predictors: (Constant), Efisiensi Belanja Daerah (X3), Transfer Pemerintah Pusat (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Sumber: data olahan SPSS, 2016

Tabel 4.9 Menyajikan nilai Sig. adalah $0,000 < 0,05$, maka disimpulkan bahwa pengaruh simultan dari seluruh variabel bebas signifikan secara statistika terhadap kemandirian keuangan daerah. Diketahui nilai *F* hitung $136,398 > F$ tabel 2,718 (*F* tabel tersaji pada lampiran 15), maka pengaruh simultan dari seluruh variabel bebas signifikan secara statistika terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa H_4 diterima dan bermakna pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat dan efeseinsi belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2013.

3. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji *t*)

Tabel 4.11 menyajikan nilai koefisien regresi, serta nilai statistik *t* untuk pengujian pengaruh secara parsial.

Tabel 4.10
Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.074	.014		5.227	.000
	Pendapatan Asli Daerah (X1)	.028	.004	.551	7.820	.000
	Transfer Pemerintah Pusat (X2)	.176	.033	.402	5.377	.000
	Efisiensi Belanja Daerah (X3)	.012	.024	.039	.509	.612

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: data olahan SPSS, 2016

- 1) Berdasarkan tabel 4.10, pendapatan asli daerah mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan nilai $t_{hitung} (7.820) > t_{tabel} (1,99)$. Dan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
- 2) Berdasarkan tabel 4.10 transfer pemerintah pusat mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05, dengan nilai $t_{hitung} (5.377) > t_{tabel} (1,99)$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
- 3) Berdasarkan tabel 4.10 efisiensi belanja daerah mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan nilai $t_{hitung} (.509) < t_{tabel} (1,99)$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

B. Pembahasan

Berdasarkan uji Statistik F yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, dan efisiensi belanja daerah) berpengaruh signifikan secara statistik dalam memprediksi kemandirian keuangan daerah, dimana signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Dari uji statistik F ini nilai sebesar 136.398 ($F_{hitung} = 136.398 > F_{tabel} 2,718$) yang berarti bahwa H1 diterima dan semua variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2013. Uji Koefisien Determinasi (R^2) juga telah dilakukan dan menunjukkan nilai Adjusted *R Square* sebesar 0,830 yang berarti 83% kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, dan efisiensi belanja daerah dan sisanya 17% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak termasuk kedalam model penelitian ini.

Hasil Uji t pada tabel 4.13 menyajikan variabel Pendapatan asli daerah dengan nilai $t_{hitung} 7.821 > t_{tabel} 1,99$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$ hal ini mengindikasikan bahwa H1 diterima dan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kurniawati (2015), Batubara (2009), Kurniawan (2011), dan Sihite (2010) PAD merupakan sumber pendapatan yang utama bagi suatu daerah dalam memenuhi belanjanya dan PAD juga sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah jadi jika disuatu daerah PAD tinggi maka dapat dikatakan suatu daerah tersebut sudah mampu mandiri dan tidak bergantung kepada bantuan pemerintah pusat maupun daerah.

Uji statistik t pada variabel transfer pemerintah pusat diperoleh t_{hitung} sebesar 5,377 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh positif dan signifikan secara statistik dalam memprediksi kemandirian keuangan daerah, karena $t_{hitung} 5,377 > t_{tabel} 1,99$, signifikansi $0,000 < 0,05$ berarti hipotesis kedua dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sihite (2010). Hal ini dikarenakan jika transfer pemerintah pusat di suatu daerah tinggi atau penerimaannya

besar maka bisa dikatakan daerah tersebut belum mandiri karena terlalu bergantung kepada transfer pemerintah pusat yang merupakan Dana Perimbangan.

Uji statistik t pada variabel efisiensi belanja daerah diperoleh t_{hitung} sebesar 0,609 dengan signifikansi sebesar 0,612. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan secara statistik dalam memprediksi kemandirian keuangan daerah, karena t_{hitung} $0,509 < t_{tabel}$ 1,99 dan signifikansi $0,612 < 0,05$ hal ini berarti hipotesis ketiga tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan jika belanja daerah di suatu daerah tinggi atau penerimaannya besar maka bisa dikatakan daerah tersebut belum mandiri karena terlalu bergantung kepada transfer pemerintah pusat yang merupakan Dana Perimbangan. Namun, hasil ini dapat menimbulkan spekulasi bahwa pengalokasian belanja modal daerah tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang riil di lapangan, tetapi karena ketersediaan dana belaka.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat dan Efisiensi Belanja Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah sebagai berikut;

1. Secara parsial variable pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2013.
2. Secara parsial variable transfer pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2013.
3. Secara parsial variable efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2013.
4. Secara simultan variable pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat dan efisiensi belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2013.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat memperbanyak kabupaten/kota yang akan diuji, sehingga akan diperoleh sampel yang banyak dan hasil yang lebih akurat. Selain dengan menggunakan sampel yang lebih banyak, penelitian selanjutnya disarankan juga agar mengambil sampel kabupaten/ kota di luar Propinsi Sumatera Utara. Ini dimaksudkan agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/kota di luar propinsi Sumatera Utara.
2. Peneliti menyarankan untuk mengambil jangka waktu yang lebih lama untuk diteliti.
3. Saran yang diberikan terkait dengan hasil analisis berkisar pada masalah pengoptimalan penerimaan dan pengeluaran daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat dan efisiensi belanja daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara, sehingga akan berdampak pada kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Harianto, Adi., 2005., Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. 2008. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan, dan PAD (kabupaten dan kota se Jawa-Bali)
- Bambang P.S Brodjonegoro, 2001., The Impact of Fiscal Decentralization Process to Indonesian Regional Economies: A Simultaneous Econometrics Approach
- Batubara, Dian, 2010, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara", Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Bapenas (2003)., PAD baik ditingkat propinsi maupun kabupaten/kota.
- Darise, N. (2009). Pengelolaan keuangan daerah (Edisi 2). Jakarta: Penerbit Indeks.
- Erlina, 2007. Metodologi Penelitian, Usu Press, Medan.
- Erlina, 2011. Metodologi Penelitian, Art Design, Publishing, and Printing, Medan.

- Ghozali, Imam, 2005. Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam, 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gamkhar, Shama and Wallace Oates, 1996. "Asymetries in Response to Increase and Decrease in Intergovernmental Grants: Some Empirical Findings". National Tax Journal. Volume 49 No. 4 hal 501.
- Gujarati, N. Damodar. 2003. Basic Econometrics. United States : The McGraw- Hill Company.
- Halim, Abdul, 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim (2008:232) Kemandirian Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2009. Bunga rampai Keuanagn Daerah, Edisi Pertama, UUP AMP, YKPN, Yogyakarta.
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi, 2007, Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Perkapita, Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Hamzah (2008)., "Menyatakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Menunjuk-Kan Kemampuan Daerah Dalam Membiayai Sendiri Pengeluaran Dalam Menjalankan Pemerintahannya".
- Hadi, Syamsul, 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi dan Keuangan, EKONISIA, Yogyakarta.
- Hastuti, Indhi, 2011. "Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi pada Kota dan Kabupaten)".
- Ikhsan, Arfan, 2008. Metodologi Penelitian Akuntansi Keprilakuan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Julitawati, Ebit, Darwanis dan Jalaludin, 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 1 No. 1 Hal 18.
- Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. 2014. Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi. Medan.
- Kaho, Josef Riwe, 2007. Prospek Otonom Daerah di Negara Republik Indonesia, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kadajtmiko., 2008, Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal, Direktorat Jendral Penimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta
- Mahsun, Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Mulia, 2007. Hubungan Belanja Modal, DAU, PAD dan Pendapatn Per Kapita pada Pemerintah Kabupaten dan Kota
- _____. 2002. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mentayani, Ida, Nurul Hayati, dan Rusmanto, 2012. " Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan", Jurnal SPREAD. Volume 2 No.2 Hal.4
- Prakosa, Kesit Bambang, 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)" . JAAI. Volume 8 Nomor 2 Hal 26.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Renyowijoyo, Muindro, 2008. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima, 2011. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Supriyono, 2007. Akuntansi Manajemen II.
- Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Bisnis, Edisi 8, Cetakan Kedelapan, CV Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2011. Metode penelitian Bisnis. Bandung. CV Alfabeta.
- Syaiful, 2006. Belanja Modal
- Sidik., Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional". Seminar Nasional "Publik Sector Scorecard", Jakarta 17-18 April 2002

- Sirait (2009)., Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pendapatan Per Kapita.
- Silitonga (2009)., Tingkat Kemandirian Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Priyo Hari Adi. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.
- Sujarweni (2015), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih
- Sedarmayanti dan Syafrudin (2011) penelitian asosiatif adalah penelitian yang bersifat menghubungkan dua variabel atau lebih dapat berupa hubungan sebab akibat, hubungan saling mempengaruhi, dan hubungan sejajar
- Umar, Husein, 2003. Metode Riset Akuntansi Terapan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wijaya (2012)., Secara parsial dan simultan, Belanja Modal dan Fiscal Stress berpengaruh terhadap peningkatan PAD pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara. Secara simultan, Belanja Modal dan Fiscal Stress dengan DBH Pajak dan Bukan Pajak sebagai variabel moderating berpengaruh terhadap peningkatan PAD pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara.
- Zega (2014)., PAD, DAU, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan dan parsial. Berdasarkan hasil analisis data yang telah di bahas di atas, maka Hipotesis penelitian yang menyatakan PAD, DAU, DBH, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan dapat
- _____ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- _____ Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wikipedia. 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. <http://id.wikipedia.org/wiki/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daaerah/> (04 April 2016)
- Website Direktorat Jenderal Perimbang Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>